

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KOTA
PEKANBARU PERIODE 2019-2024 (STUDI KASUS DPC PARTAI
DEMOKRAT KOTA PEKANBARU)**

Oleh : Septia Sandriyani

Pembimbing : Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

septia.sandriyani2756@student.unri.ac.id

ABSTRACT

The importance of the role of legislators for the sustainability of democracy in Indonesia makes the recruitment process of these legislators also important because the good or bad of the legislature members who sit in parliament will be determined by the recruitment process. The Pekanbaru City DPRD legislative elections for the 2019-2024 period showed that the Democratic Party's seat acquisition increased, from 6 seats to 7 seats and was the second most seats acquired after the Prosperous Justice Party (PKS). This study aims to describe the Recruitment Pattern of Candidates for Legislative Members of the Pekanbaru City DPRD for the 2019-2024 Period (Case Study of the Pekanbaru City Democratic Party DPC), in achieving the objectives of this study the authors used the theory of open and closed political recruitment mechanisms and the theory of the nature of Sahid Gatara's political recruitment process i.e. top-down, bottom-up and mixed.

The research method used is a qualitative method by explaining descriptively. The type of research data used is primary data in the form of data obtained from research informants and secondary data obtained from related documents that can support data for research. The research location is in Pekanbaru City, Riau Province.

This research suggests that the Recruitment Pattern for Candidates for Legislative Members of the Pekanbaru City DPRD for the 2019-2024 period (Case Study of the Pekanbaru City Democratic DPC) uses an open political recruitment mechanism. The Democratic Party opens opportunities for anyone who wants to register both internally and externally. As well as the political recruitment process used is mixed by combining top-down and bottom-up systems. To find the best candidate for society, the Democratic Party has 5 (five) stages in the mechanism for recruiting candidates for its legislative members. Among them are registration, psychological tests, first and second interviews, then finally determining the results. In the placement of elective areas (dapils) it is left to the candidates themselves but still under the supervision of the party. Serial numbers are determined in two ways. The first is the prerogative of the chairman of the DPC accompanied by advice and input from party officials. Second, based on the score obtained by the candidates during the selection period. The Democratic Party also assesses and considers several factors before finally determining the names that pass as candidates.

Keywords: Political Recruitment, Legislative Member Candidates, DPRD

PENDAHULUAN

Latar belakang

Rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, dalam proses ini partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara menyeleksi calon-calon pemimpin (Budiardjo, 2015). Adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yaitu:

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Rekrutmen politik;
4. Pengatur konflik.

Pippa Norris (dalam Rizki, 2017) menyebutkan ada berbagai tahapan yang dilakukan dalam proses rekrutmen khususnya partai politik dalam menjalankan proses organisasi dalam menentukan calon wakil dalam parlemen atau pemerintahan adalah tahapan sertifikasi, tahap nominasi, dan pemilihan. Rekrutmen calon anggota legislatif melalui 4 (empat) langkah atau

tahapan yakni: pertama, sistem politik, sistem politik diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perekrutan calon anggota legislatif, adanya sistem kepartaian yang menjadi peserta di dalam pemilihan untuk menjadi “jembatan” dan menjadi lembaga yang merekrut, adanya sistem pemilu yang mendukung calon untuk dapat berkompetisi, adanya calon atau kandidat yang berada di setiap daerah pemilihan dan siap untuk dijadikan sebagai calon, dalam arti bahwa mereka dapat di terima oleh konstituen (Suhaimi, 2018). Dalam perekrutan anggota legislatif, perlu adanya tahap yang dilewati untuk memastikan apakah kandidat tersebut sudah sesuai dengan sumber daya manusia yang dicari atau belum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatan baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten/kota merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam mengawal serta menjalankan proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, untuk membentuk undang-undang, fungsi *budgeting* untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem yang demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga.

Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi penting karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk

di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang nantinya

akan duduk di parlemen karena rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik.

Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Demokrat Kota Pekanbaru Periode 2019-2024

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Nama	Keterangan
1.	Dapil I (Kec. Sukajadi, Pekanbaru Kota, Lima Puluh)	1. Roem Diani Dewi, S.E, M.M 2. Drs. H. Bilhaya Athar, M.A 3. Yolanda, S.E, S.Y 4. Indra, S.H 5. Mariyani, S.Pd 6. Deswartifo Kawi	Eksternal Eksternal Internal Internal Eksternal Internal
2.	Dapil II (Kec. Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur)	1. Aidil Amri, S.Sos 2. Frisca Angreini A. Munir 3. Zulfahmi 4. Rani Navita Sari 5. Drs. H. Abdul Rachman, M.Si 6. Rahma Yuni 7. Mujiono	Internal Internal Internal Internal Eksternal Eksternal Internal
3.	Dapil III (Kec. Sail Kulim Tenayan Raya)	1. Heri Setiawan, S.H 2. Yuosefri 3. Suterlina Zalukhu 4. Ade Gunawan 5. Azwita 6. Rita Zahara 7. Surya Lesmana	Eksternal Internal Eksternal Internal Eksternal Eksternal Eksternal
4.	Dapil IV (Kec. Bukit Raya, Marpoyan Damai)	1. T. Azwendi Fajri, S.E 2. Syamsul Bahri, S.Sos 3. Karmila Dharma Santi 4. Abdul Khair 5. Siti Rohana 6. Rahmad Syah 7. Nita Angela Sari 8. Kamaruzaman 9. Ramzen Ampera 10. Ananda Febriyanda 11. Isnen	Internal Internal Internal Eksternal Eksternal Internal Eksternal Eksternal Internal Eksternal Internal
5.	Dapil V (Kec. Tampan)	1. Sigit Yuwono, S.T 2. Pangkat Purba, S.H 3. Hj. Desi Susanti, S.Sos 4. Drs. H. Yuhasri, M.M 5. Olbitor 6. Erika Valentina, S.H, M.Kn	Internal Internal Internal Internal Eksternal Eksternal

		7. Jessica Putri Hanov 8. Muhammad Iqbal	Eksternal Eksternal
6.	Dapil VI (Kec. Payung Sekali, Senapelan)	1. Drs. Sutikno 2. Jepta Sitohang 3. Eka Saputra 4. Rahmawati, S.H 5. Firdaus Basir 6. Abrizal Risha, S.E, M.M	Internal Eksternal Internal Internal Eksternal Eksternal

Sumber: DPC Demokrat Kota Pekanbaru

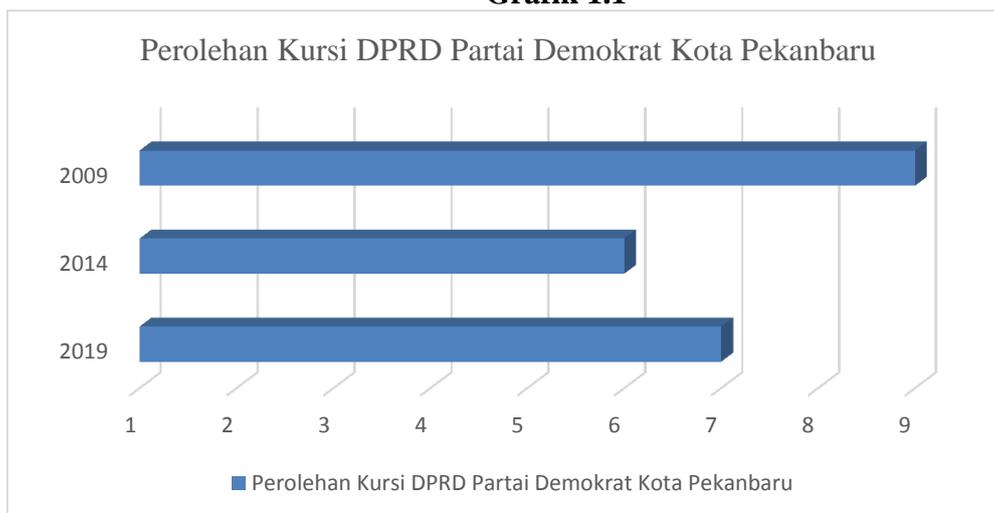
Tabel 1.1 di atas merupakan nama-nama calon anggota legislatif DPRD Partai Demokrat Periode 2019-2024 yang berjumlah 45 orang, terdiri dari 23 internal dan 22 eksternal dan telah dibagi kedalam 6 daerah pilihan (dapil). Dapil I Kec. Sukajadi, Pekanbaru Kota, Lima Puluh terdapat 6 caleg. Dapil II Kec. Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur dan Dapil III Kec. Sail Kulim Tenayan Raya terdapat 7 caleg. Dapil IV Kec. Bukit Raya, Marpoyan Damai terdapat 11 caleg. Dapil V Kec. Tampan terdiri dari 8 caleg. Dapil VI Kec. Payung Sekali, Senapelan terdapat 6 caleg.

Dilihat dari segi umur, calon anggota legislatif yang berada pada usia produktif (30-50 tahun) berjumlah 26 orang. 19 orang lainnya berusia 50-80

tahun. Dilihat dari segi pendidikan, 20 orang (44%) SMA/SMK/Sederajat, 1 orang (2,2%) D3, 17 orang (37,4%) S1, dan 7 orang (15,4%) S2. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan mencukupi walaupun sebagian besar adalah SMA, sesuai dengan persyaratan minimal. Beberapa sarjana dari disiplin ilmu tentang ekonomi (S.E) dan hukum (S.H), akan tetapi tidak ada satupun gelar kesarjanaaan yang berlatar belakang keahlian ilmu politik atau ilmu pemerintahan.

Dari 45 orang caleg, Partai Demokrat berhasil memperoleh 7 kursi. Data grafik dari 3 periode terakhir yaitu 2009, 2014 dan 2019 dapat dilihat di bawah ini.

Grafik 1.1



Sumber: kpu.go.id

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa perolehan suara partai Demokrat pada Pemilu Legislatif

2019 menunjukkan bahwa perolehan kursi Partai Demokrat meningkat, yang semula 6 kursi menjadi 7 kursi. Berikut

nama-nama anggota legislatif DPRD Partai Demokrat yang menjabat pada periode 2019-2024:

- Dapil I : Roem Diani Dewi, S.E, M.M 2.174 suara
- Dapil II : Aidil Amri, S.Sos 5.825 suara
- Dapil III : Heri Setiawan, S.H 3.106 suara
- Dapil IV : T. Azwendi Fajri, S.E 4.336 suara
- Dapil V : Sigit Yuwono, S.T 4.208 suara dan Pangkat Purba, S.H 3.781 suara
- Dapil VI : Jepta Sitohang, S.Pd 1.607 suara

Kemenangan Partai demokrat di Kota Pekanbaru tidak serta-merta

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0 kursi
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7 kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6 kursi
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4 kursi
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1 kursi
6	Partai Garuda	0 kursi
7	Partai Berkarya	0 kursi
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 kursi
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0 kursi
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 kursi
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0 kursi
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	6 kursi
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5 kursi
14	Partai Demokrat	7 kursi
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0 kursi

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya terdapat 15 Partai yang ikut serta dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024. Dari 15 partai politik tersebut, Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) mendapatkan kursi terbanyak yaitu berjumlah 8 kursi. Sementara itu untuk Partai Demokrat berada pada posisi kedua terbanyak dengan perolehan sebanyak 7 kursi.

dikarenakan figur Susilo Bambang Yudhono sebagai pendiri sekaligus pembina partai Demokrat, namun hal ini juga tidak lepas dari peran anggota/kader Partai Demokrat dalam membangun pencitraan partai di masyarakat. Kemampuan para anggota dalam melaksanakan program-program partai hingga mencapai sasaran, serta kemampuan anggota dalam pembentukan citra partai sangat dipengaruhi oleh kualitas dari anggota tersebut. Adapun Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kualitas anggota partai politik sangat ditentukan dengan bagaimana pola rekrutmennya. Tingkat selektifitas rekrutmen anggota partai politik merupakan langkah awal yang sangat menentukan kualitas dari kinerja partai politik. Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 (Studi Kasus DPC Partai**

Demokrat Kota Pekanbaru)”. Rumusan Masalah

Bagaimana pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD partai Demokrat di Kota Pekanbaru tahun 2019-2024?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Partai Demokrat di Pekanbaru tahun 2019-2024.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian komparatif antara pengetahuan teoritis dan praktek lapangan, serta memberikan referensi bagi pengembangan keilmuan bidang pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif.

Kajian Teori

a. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Menurut Mufti (2013), berdasarkan ideologi kepentingan, partai politik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Partai kader

Partai kader sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal.

2. Partai massa

Partai massa muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada di luar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa.

3. Partai diktatorial

Partai diktatorial merupakan subtype dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai.

4. Partai *catch-all*

Partai *catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

Dalam hal ini Partai Demokrat merupakan partai massa. Besarnya

massa yang dikelola menjadi kekuatan dari partai massa itu sendiri. Strategi mobilisasi yang terbuka berupaya menyaring simpatisan sebanyak-banyaknya sehingga menjadi kekuatan massif yang mampu digerakkan menjadi kekuatan penekan secara politis maupun menjadi mesin politik saat pemilu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, partai massa memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa. Sama halnya dengan Partai Demokrat yang memiliki pendidikan politik tersendiri yang bernama Akademi Demokrat. Akademi Demokrat dibentuk sebagai ujung tombak transformasi Partai Demokrat menjadi partai modern yang berasaskan nasional-religius melalui pendidikan profesional dan merit system. Jati diri Akademi Demokrat adalah sekolah pejuang, patriot, dan kader pemimpin bangsa. Akademi Demokrat adalah bagian dari pendidikan politik dan cara Partai Demokrat dalam melakukan transformasi kepartaian ke arah yang lebih baik. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menggunakan sistem Tri Pola Dasar, yaitu pelatihan secara fisik, mental, dan intelektual. Pendidikan ini gratis, tidak dikenakan biaya untuk para siswa-siswinya. Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yaitu:

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Rekrutmen politik;
4. Pengatur konflik.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang

ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Tujuan dari rekrutmen politik adalah untuk mengetahui perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik.

Pada umumnya partai melakukan rekrutmen melalui dua pola yaitu secara terbuka dan tertutup seperti teorinya Rush dan Althoff (Kartono K, 2007). Dari model terbuka semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintahan dengan kesempatan yang sama. Sehingga orang-orang yang memiliki kompetensi dan teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya, dan kompetisi dengan pola rekrutmen terbuka sangat tinggi persaingannya dalam mengisi sebuah jabatan. Sebaliknya dalam sebuah kompetisi rekrutmen tertutup kesempatan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, dan pola proses rekrutmen hanya sebatas pada sekelompok elit tertentu. Integritas tentang adanya ujian kualitas biasanya sangat jarang dilakukan dan nilai moral dalam bermasyarakat serta visi yang melekat kurang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid Gatara (2007) yaitu:

- a. *Top-down* artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
- b. *Bottom-up* artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh

sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

- c. Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara model top-down dan bottom-up. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam dalam mendeskripsikan masalah dalam lingkup penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen politik adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan, rekrutmen politik merupakan fungsi strategis parpol yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini

bagi parpol sehingga fungsi-fungsi parpol lainnya menjadi kurang bermakna jika parpol gagal dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik.

Diantara rekrutmen terbuka dan tertutup, Partai Demokrat menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka yang artinya semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintahan dengan kesempatan yang sama. Dalam rekrutmen terbuka terdapat dua mekanisme: pertama, merekrut calon anggota legislatif dari internal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kadernya yang menjadi pengurus di partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif di eksternal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader partai untuk direkrut sebagai calon legislatif, seperti tokoh masyarakat dan para simpatisan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

1. Berdomisili di Kota Pekanbaru (fotocopy KTP 2 lembar)
2. Terdaftar sebagai Anggota Partai Demokrat (fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) 2 lembar)
3. Pendidikan minimal SLTA (fotocopy ijazah terakhir 2 lembar)
4. Mengisi formulir pendaftaran
5. Surat Pernyataan Patuh Terhadap Peraturan dan Ketetapan Partai
6. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Anggota Partai Politik Lain
7. Bersedia mengikuti wawancara

8. Menandatangani pakta integritas
9. Menyerahkan pas foto ukuran 4x6 terbaru sebanyak 5 lembar
10. Batas pengambilan formulir 1 minggu (7 hari) setelah pengambilan berkas

Proses rekrutmen yang digunakan adalah proses campuran yang artinya proses seleksi yang memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* itu sendiri artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Sedangkan *bottom-up* artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Setelah para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menyerahkan berkas, selanjutnya ada tahap-tahap seleksi yang harus dilalui. Berikut langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Partai Demokrat.

Persiapan

Pada tahap persiapan ini, kegiatan yang dilakukan Partai Demokrat yaitu membentuk tim penyaring. Tugas tim khusus rekrutmen calon anggota legislatif yaitu penyusunan kriteria calon anggota legislatif terutama dalam hal kompetensi dan keahlian, menetapkan perbandingan calon anggota legislatif internal dan eksternal partai politik, serta menetapkan persyaratan calon anggota legislatif yang secara objektif bersih dari korupsi, kolusi, atau nepotisme.

Proses Seleksi

Terdapat 5 (lima) tahapan seleksi sampai akhirnya calon anggota legislatif berhasil terpilih, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tahap pertama Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon. Bakal calon yang mendaftar harus melengkapi dokumen administrasi yang ditentukan oleh Partai Demokrat. Kemudian DPC akan melaksanakan dan mengumumkan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen administrasi. Bagi bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan dan harus diperbaiki. Namun, jika kesempatan diberikan dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak diselesaikan serta tidak berhasil diperbaiki, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon potensial.
2. Tes pertama yaitu tes psikotes yang bertujuan untuk melahirkan kader-kader yang terbaik dan berkualitas serta menggali potensi sekaligus mengukur kelebihan dan kekurangan seluruh bacaleg sebelum dipilih menjadi wakil rakyat. Dalam hal ini, DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) yang telah terakreditasi A.
3. Kemudian dilanjut dengan wawancara bersama pihak ketiga yaitu Tim Ahli Strategi Politik yang dari Kota Malang. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali ketokohan, potensi, serta indikator lainnya untuk memutuskan bacaleg tersebut layak atau tidak untuk

menjadi caleg Partai Demokrat.

4. Wawancara kedua bersama Tim Lima yang terdiri dari 5 (lima) orang internal Partai Demokrat yang telah dipilih oleh Ketua DPC. Pada wawancara kedua ini, dilakukan penajaman pertanyaan yang bertujuan untuk lebih mengenal dan mengetahui kepribadian caleg tersebut, seperti kepribadiannya, kesetiiaannya terhadap partai serta visi misi yang dimiliki oleh bacaleg tersebut.
5. Pada tahap terakhir, nama-nama bacaleg yang direkomendasikan diserahkan kepada Ketua DPC. Hasil akhir nantinya akan diputuskan oleh pengurus tetapi tetap dipimpin oleh Ketua DPC.

Pada tahapan tersebut, terdapat skor tertentu yang akan diberikan kepada para caleg dan nantinya akan ada yang gugur disetiap tahapnya. Pola rekrutmen seperti ini telah digunakan oleh seluruh Partai Demokrat se-

Provinsi Riau. Pengumuman membuka pendaftaran caleg bagi eksternal atau yang berasal dari luar Partai Demokrat, yaitu yang berasal dari masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui media oleh DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam penjangringannya, DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru juga melibatkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Pekanbaru yang tersebar di 15 kecamatan. Dengan menggunakan pola rekrutmen tersebut, Partai Demokrat menargetkan 8 kursi DPRD, namun pada kenyataannya hanya mendapatkan 7 kursi. Itu artinya, Partai Demokrat berhasil mendapatkan 87.5% dari target yang ada.

Partai Demokrat Kota Pekanbaru Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024

Partai Demokrat Kota Pekanbaru belum memiliki program pembinaan khusus perempuan, program pembinaan yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya sebatas sosialisasi. Di sisi lain, Partai Demokrat Kota Pekanbaru memiliki organisasi sayap partai yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI).

Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrat Kota Pekanbaru Periode 2019-2024

Daerah Pemilihan	Nama	Status
Dapil 1	1. Roem Diani Dewi, S.E, M.M	Aktif
	2. Yolanda, S.E, S.Y	Tidak Aktif
	3. Mariyani, S.Pd	Aktif
Dapil 2	4. Frisca Angreini A. Munir	Tidak Aktif
	5. Rani Navita Sari	Tidak Aktif
	6. Rahma Yuni	Tidak Aktif
Dapil 3	7. Suterlina Zalukhu	Tidak Aktif
	8. Azwita	Aktif
	9. Rita Zahara	Tidak Aktif
Dapil 4	10. Karmila Dharma Santi	Aktif
	11. Siti Rohana	Tidak Aktif

	12. Nita Angela Sari 13. Ananda Febriyanda	Tidak Aktif Tidak Aktif
Dapil 5	14. Hj. Desi Susanti, S.Sos 15. Erika Valentina, S.H., M.Kn 16. Jessica Putri Hanov	Aktif Tidak Aktif Tidak Aktif
Dapil 6	17. Jepta Sitohang, S.Pd 18. Rahmawati, S.H	Aktif Tidak Aktif

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

Dari 18 caleg perempuan, dua diantaranya berhasil menduduki kursi DPRD, yaitu Roem Diani Dewi S.E, M.M dengan 2.174 suara serta Jepta Sitohang S.Pd dengan 1.607 suara. Setelah pemilihan calon anggota legislatif perempuan, pada tabel 3.1 perlu dilakukan *review* terhadap pedoman calon yang tidak terpilih atau kalah. Peneliti menggali lebih dalam kepemimpinan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap caleg perempuan yang tidak terpilih dan menemukan fakta bahwa hanya sedikit caleg perempuan yang kalah yang dirangkul kembali oleh partai. Menurut partai, beberapa dari mereka ada juga yang mengundurkan diri, alasannya karena sudah tidak mau berpolitik dan faktor umur. Data menunjukkan bahwa dari 16 caleg perempuan yang kalah pada tahun 2019, terlihat hanya 4 orang yang masih aktif dalam struktur organisasi Partai Demokrat dan kegiatan lainnya.

Penetapan Daerah Pemilihan dan Nomor Urut

Penetapan daerah pemilihan Partai Demokrat Kota Pekanbaru berdasarkan keinginan caleg. Partai Demokrat menilai bahwa caleg itu sendiri yang mengetahui kemampuannya seperti apa. Partai Demokrat mengakomodir keinginan calegnya, namun tetap dalam pengawasan partai. Jika partai menilai caleg tersebut tidak punya potensi yang cukup besar untuk meraih suara di dapil yang diinginkan, Partai Demokrat akan

menyarankan untuk pindah ke dapil lain yang dinilai potensi suara dan jaringannya lebih bagus. Namun keputusan terakhir tetap diserahkan kepada yang bersangkutan yaitu caleg itu sendiri. Dalam menentukan nomor urut caleg, Partai Demokrat memiliki beberapa cara. Yang pertama, hak prerogatif ketua partai. Meskipun demikian, ketua partai selalu meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari petinggi-petinggi partai. Untuk di tingkat kota contohnya seperti sekretaris, bendahara, ketua bappilu, ketua BPOKK, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan request dari caleg tersebut. Namun tidak jarang juga para caleg menyerahkan semuanya kepada partai tanpa request tertentu. Tetapi pada akhirnya, semua bergantung pada skor yang sudah para bacaleg dapatkan. Skor inilah nantinya bisa menjadi penentuan nomor urut caleg yang bersangkutan, sesuai dengan prosedurnya.

Dalam menentukan nomor urut caleg perempuan, Partai Demokrat membuat perbedaan dengan caleg laki-laki dimana nomor urut caleg perempuan berganti-ganti dengan nomor urut caleg laki-laki sesuai dengan skor yang diperoleh, hal ini disebabkan ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dimana calon laki-laki lebih dominan dibandingkan calon perempuan. Penetapan nomor urut caleg perempuan didasarkan pada skor yang diberikan partai kepada caleg. Yang pasti 3 angka teratas harus ada

perempuan, tidak harus berurutan, yang paling penting adalah 3 angka teratas harus memiliki perempuan baik ditempatkan pada nomor 1, 2 ataupun 3.

Faktor Penyebab Kader Partai Lain Memilih Pindah ke Partai Demokrat Sebagai Sarana Partisipasi Politik Selanjutnya

1. Pengaruh Dari Teman atau Keluarga

Pengaruh dari kawan sejawat bisa mempengaruhi kader dari partai lain untuk masuk ke Partai Demokrat. Kemudian selain dipengaruhi oleh kawan sejawat, keluarga juga bisa menjadi penyebab kader partai lain masuk ke Partai Demokrat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga sangat potensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga.

Menurut Apter, dalam tahapannya keluarga merupakan langkah pertama bagi individu dalam mempelajari politik. Baik disengaja atau tidak, segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua) akan diserap dan disimpan dalam ingatan individu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, semakin seringnya interaksi yang terjalin antara individu dan keluarga maka secara tidak sadar hal tersebut akan mempengaruhi individu dalam cara pandangya terhadap sistem

politik, reaksinya kepada isu-isu politik yang sedang terjadi, serta bagaimana ia menentukan sikapnya dalam politik.

2. Perbedaan Kepentingan

Berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Kepentingan individu maupun kelompok bisa saja memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Setiap upaya mesti dilandasi oleh sebuah kepentingan, begitu juga dengan politik. Politik, dalam teori klasik Aristoteles dipahami sebagai upaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kata kebaikan bersama menjadi kata kunci dalam definisi ini. Dengan kata lain, kepentingan yang diusung dalam berpolitik jika mengacu pada pandangan Aristoteles, haruslah mengarah pada kepentingan yang dimaksudkan demi terwujudnya kebaikan bersama. Kepentingan ini, dalam bahasa lain disebut sebagai kepentingan nasional.

Terkait kelompok kepentingan, partai politik adalah termasuk salah satu bagian dari kelompok kepentingan ini, yaitu kelompok kepentingan yang institusional, yang bergerak dibawah payung konstitusi atau undang-undang. Partai politik dibentuk dan dirumuskan untuk kepentingan tidak kurang dan tidak lebih demi terwujudnya masa depan bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, eksistensi partai politik memegang peranan sentral dalam menegakkan cita-cita politik bangsa.

3. Konflik Internal Partai

Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam kajian

sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain disebut dengan *gregariousness*. Lebih lanjut, interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi yang terjadi pada kehidupan manusia memiliki potensi-potensi untuk menimbulkan konflik jikalau mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dalam interaksi sosial bisa terjadi biasanya antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, serta antara individu dengan kelompok karena berbeda atau bertentangan dengan tujuan mereka.

Dalam aktivitas politik, terjadinya konflik merupakan gambaran bahwa adanya dua kepentingan yang berbeda dan saling bertubrukan. Konflik internal merupakan sebuah permasalahan yang bisa terjadi di dalam tubuh suatu organisasi karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, perbedaan pendapat dan perebutan kekuasaan tertinggi. Salah satunya adalah partai politik, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kader partai, fungsi partai, kepentingan partai, dan stabilitas partai.

Dalam sebuah rezim demokratis, benturan kepentingan dan nilai politik merupakan sesuatu yang lumrah sebagai akibat dari dihormati dan dijaminnya perbedaan pendapat. Sepanjang konflik tersebut tidak menghancurkan tatanan sistem dan kelembagaan demokrasi, maka ia harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari perpecahan di dalam internal partai politik itu sendiri merupakan tugas yang berat. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan pada jalannya roda partai politik di pemerintahan

maupun dalam persaingan pemilu. Karena jika di dalam partai politik itu sendiri terdapat masalah yang besar dan mengancam elektabilitas partai politik, maka kader-kader partai politik berpeluang untuk keluar dan mencari partai politik yang memiliki elektabilitas yang lebih tinggi.

Faktor Pertimbangan Rekrutmen

Berdasarkan analisa penulis mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan rekrutmennya. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan rekrutmen adalah sebuah ukuran tentang bagaimana partai menilai dan mempertimbangkan caleg yang ada. Riswanda Imawan dalam bukunya memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley (Wan Asrida dalam Wazni, 2013):

1. Social Background

Pengaruh status sosial, ekonomi dan keluarga merupakan hal yang berhubungan dengan faktor ini. Partai demokrat memperhatikan latar belakang sosial dari calon anggota legislatifnya. Misalnya, Bapak Ramzen Ampera selaku Direktur Utama PT. Adfana Interjaya Sejahtera serta pemilik R&D Snack yang sudah berjalan sejak tahun 2012. Dilihat dari status sosial dan ekonomi keluarganya Bapak Ramzen mendukung untuk berkompetisi di dunia politik.

2. Political Socialization

Melalui sosialisasi politik, seseorang dapat membiasakan diri (*familiar*) dengan tugas atau isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian, orang tersebut bisa memutuskan apakah ia

mau dan memiliki kemampuan untuk menempati posisi ini, agar ia bisa mempersiapkan dengan baik. Faktor ini belum dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Dalam rekrutmen caleg, Partai Demokrat membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat umum.

3. Initial Political Activity

Aktivitas atau pengalaman politik seseorang (kandidat) elit selama ini yang akan dinilai dalam faktor ini. Dalam praktek politik, faktor ini menjadi semacam "belunggu" bagi elit karena ia berhubungan dengan garis afiliasi kelompok yang diikutinya. Faktor ini juga belum dipertimbangkan oleh Partai Demokrat.

4. Apprenticeship

Faktor ini mengarah langsung ke proses "magang" calon elit kepada elit lainnya yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit yang lain. Sisi positif dari faktor ini calon elit lebih memahami mekanisme kerja yang benar dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerjanya. Sisi negatifnya adalah reputasi calon elit dapat "tenggelam" sebab kualitas elit yang digantikannya lebih baik dibanding dirinya yang menggantikan. Di sisi lain, jika elit yang diganti memiliki reputasi yang sangat tinggi, kemudian calon elit itu akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulu. Partai Demokrat tidak mengadakan proses magang untuk menjadi anggota legislatif.

5. Occupational Variables

Hampir sama dengan faktor ketiga, bedanya disini, calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Karena sesuai dengan ajaran demokratis, elit politik

sebenarnya tidak hanya dinilai dari popularitas saja. Faktor lain juga dinilai seperti kapasitas intelektual, merasa diri menjadi orang penting, vitalitas kerja, peningkatan kemampuan yang diperoleh dan pengalaman kerja. Faktor ini diperhatikan dan menjadi pertimbangan oleh Partai Demokrat. Para calon anggota legislatif dinilai memiliki pengalaman kerja yang baik dan cukup sukses sehingga memiliki dana yang cukup untuk menjadi caleg.

6. Motivation

Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik berdasarkan asumsi yang digunakan oleh pakar politik adalah sebagai berikut:

- A. Harapan atas *personal reward* (material, sosial dan psikologis)
- B. Orientasi mereka terhadap masalah politik seorang pemimpin atau karena alasan lain, yang disebut *collective goals*. Seharusnya seorang elit membedakan kedua hal tersebut, tapi yang banyak terjadi adalah para elit memanipulasi *personal needs* menjadi *public objectives*.

Partai Demokrat mempertimbangkan faktor motivasi ini. Veni Clara Victoria (dalam Wazni, 2013) menyebutkan bahwa motivasi dari calon anggota legislatif Partai Demokrat adalah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, financial, rasa aman dan kebutuhan afiliasi; dorongan dari diri sendiri, keluarga, partai dan ikut-ikutan; tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum, menambah suara partai politik dan memenuhi kebutuhan pribadinya.

7. Selection

Mekanisme rekrutmen politik dikenal adanya dalam ilmu politik.

Syarat serta prosedur untuk menampilkan seseorang tidak harus datang dari kalangan partai sendiri dalam rekrutmen terbuka. Cara ini memberi rakyat kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya serta sangat kompetitif. Partai Demokrat melakukan seleksi dalam menemukan calon anggota legislatif terbaik di masyarakat. Partai Demokrat menggunakan sistem rekrutmen terbuka dan menyeleksi dengan 5 (lima) tahap sampai akhirnya menentukan nama-nama yang lolos menjadi calon anggota legislatif Partai Demokrat.

Partai Demokrat adalah sebuah partai yang merupakan institusi politik yang memiliki salah satu fungsi rekrutmen politik, guna menghasilkan calon-calon pemimpin yang nantinya akan dipersiapkan untuk menduduki jabatan legislatif melalui proses pemilu. Melalui rekrutmen politik nantinya akan menjamin kelestarian di dalam internal partai politik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian Pola Rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Partai Demokrat periode 2019-2024 (Studi Kasus DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru). Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Partai Demokrat merupakan partai terbuka yang tentunya menganut sistem rekrutmen terbuka dan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bergabung dan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif DPRD. Jumlah caleg terpilih

DPRD Kota Pekanbaru yaitu 45 orang. Dari Partai Demokrat sendiri mendapatkan 7 kursi yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan.

2. Berdasarkan fenomena menarik yang ditemukan, keunggulan Partai Demokrat di legislatif tidak terlepas dari pola rekrutmennya. Partai Demokrat menggunakan sistem rekrutmen campuran yang dimana proses seleksi tersebut memadukan antara *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* itu sendiri merupakan rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Sedangkan *bottom-up* adalah proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Disamping itu, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi dan proses seleksi yang harus dijalani oleh para kandidat. Maka dengan begitu, Partai Demokrat dapat menentukan calon anggota legislatif DPRD.
3. Untuk penempatan dapil, Partai Demokrat menyerahkan kepada caleg itu sendiri untuk memilih namun tetap dalam pengawasan partai. Nomor urut caleg ditentukan berdasarkan dua cara, yang pertama hak prerogatif ketua DPC tentunya dengan masukan dan saran dari petinggi-petinggi partai, yang

kedua berdasarkan skor yang didapat oleh caleg tersebut selama masa seleksi.

4. Untuk mendapatkan calon yang berkualitas, perlu ada beberapa aspek yang dinilai dan dipertimbangkan. Dari faktor pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley, Partai Demokrat telah mempertimbangkan dari segi *social background, occupational variables, motivation, serta selection.*

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian terhadap pola rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 (Studi Kasus DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru), antara lain :

1. Peneliti menyarankan agar Partai Demokrat memperkuat pola dan sistematisasi rekrutmen secara sistematis dan berkesinambungan. Juga disarankan agar lebih terbuka sesuai dengan sistem yang digunakan serta memberikan kesempatan yang sama terhadap para calon anggota legislatif, karena terlihat masih ada hak istimewa ketua DPC dalam rekrutmen ini.
2. Untuk caleg yang tidak berhasil mendapatkan kursi sebaiknya Partai Demokrat tetap mendukung dan merangkul kembali serta memberikan evaluasi yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

3. Melakukan pengkaderan yang optimal terhadap calon anggota legislatif untuk meningkatkan kualitasnya menjadi bekal mereka saat pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan E-book

- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus. (2015). *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya.
- Gatara, Sahid. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hardani, H. A., & Andriani, H. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kartini Kartono. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mufti, Muslim, dkk. (2013). *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Setiadi, Elly & Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana
Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di*

- Indonesia. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- S. Katz, Richard and William Crotty. (2006). *Handbook Of Party Politics*. London: SAGE Publications.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sihombing, Eka Nam. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- B. Jurnal**
- Amin, R. M., & Pratama, B. D (2015). *Rekrutmen Politik Partai Demokrat Tahun 2013 di Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Else Suhaimi. (2013). Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 105–123.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasyim, M., Nurhayati, S., Tryatmoko, M., Gayatri, I., Kartini, I., Siregar, S. N., & Budiatri, A. putri. (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia. Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia, 1–113.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2.
- Kristina Agustiani Sianturi. (2015). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). *Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–22.
- Prasojo, T. A. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 21–29.
- Pratama, B. D. (2015). Rekrutmen Politik Partai Demokrat Tahun 2013 di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM (Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 2(1), 1–10.
- Purwitasari, A. Y., & Martini, R. (2014). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Provinsi Jawa Tengah Partai Nasional Demokrat Pada Pemilu 2014 (Studi Di Dpw Partai Nasional Demokrat Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(1), 176–185.
- Rahmadania, F. (2014). Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur). *Jurnal Politik Muda*, 3(1), 75–85.
- Riyadh U.B., A., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3(2), 179–198.
- Rizki, D. K. (2017). Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 67–72.
- Saherimiko, S., & Usmulyadi, S. U. (2020). Proses Rekrutmen Calon Legislatif Tahun 2019 Partai Demokrat Di Dewan Pimpinan Cabang Kota Pontianak. *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik*, 8(3).
- Salsabila, R. S., & Tinov, T. M. .

- (2016). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekan Baru Tahun 2014. *Jom Fisip*, 3(2), 1–11.
- Septian, D. (2014). Rekrutmen politik dalam Penetapan Calon Legislatif 2014 - 2019. 2019, 29.
- Sianturi, K. A. (2018). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Sirajuddin. (2009). Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Observasi Vol. 7 No. 2, Th. 2009*.
- Siti Zaetun, & Mar'iyah, C. (2020). Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 119–129.
- Suhaimi, Else. Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, vol. 18, no. 1, 2018, pp. 105-124.
- Wazni. (2013). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Partai Politik di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009: Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(16), 102-127. Retrieved from <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/10>
- Yokotani. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. XI No.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- D. Media Online**
- Apa Itu Akademi Demokrat?* (2019). Retrieved from Website Partai Demokrat: <https://www.demokrat.or.id/apa-itu-akademi-demokrat/> diakses pada 2 Juli 2023 pukul 19:00 WIB.
- Berita Pemko. (2019, September 6). “45 Anggota DPRD Pekanbaru Periode 2019-2024 Resmi Ucapkan Sumpah”, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/45-anggota-dprd-pekanbaru-periode-2019-2024-resmi-ucapkan-sumpah> diakses pada 10 November 2022 pukul 10:15 WIB.
- Ibrohim, Amien Nulloh. (2022). “Profil Partai Demokrat: Sejarah, Pendiri dan Struktur Organisasi”, <https://nasional.sindonews.com/read/982463/12/profil-partai-demokrat-sejarah-pendiri-dan-struktur-organisasi-1672312333> diakses pada 19 Maret 2023 pukul 19:12 WIB.
- Visi dan Misi Partai Demokrat*. (2020). Retrieved from Website Partai Demokrat: <https://www.demokrat.or.id/visi-misi/> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 12:31 WIB.
- Wikipedia. (2023). *Wikipedia.org*.

Diakses pada 19 Maret 2023
pukul 19:36 WIB, from
Wikipedia Website:
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat